2015

Hal.: 17



8 (9) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## **PEMERIKSAAN**

## Terkesan Dipaksakan

MARAKNYA pemeriksaan terhadap kasus-kasus oleh para penegak hukum



Erwan Irawan

saat ini dianggap menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha dan instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan, khususnya proyek pembangunan.

Bahkan, terkesan ada beberapa instansi pemerintahan yang enggan melaksanakankeg-

iatan mereka, dengan alasan takut tersandung kasus hukum. Meskipun pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai aturan

KetuaBarisanPatriotBelaNegara(BPBN), Erwan Irawan, menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan memandang kasus-kasus yang diperkarakan tersebut merupakan kasus lama. Sementara, dia

♦ Ke Halaman 27 kolom 5

## Terkesan Dipaksakan

Sambungan dari halaman 17

yakin, apa yang diperkarakan tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat dan BPK, sesuai dengan kewenangan mereka secara maksimal dan profesional. "Terkecuali kasus yang diperkarakan itu merupakan temuan dari hasil pemeriksaan BPK atau lembaga pemeriksaan keuangan lain, boleh ditindaklanjuti oleh

aparat penegak hukum yang berwenang," katanya.

Menurut Erwan, ada juga beberapa kasus yang terkesan dipaksakan, hanya karena adanya laporan oknum masyarakat tertentu. "Saya beranggapan ada indikasi permainan antara penegak hukum dengan oknum tersebut," bebernya. Dengan seperti itu, dia khawatir mengesankan pemeriksaan yang dilakukan BPK atau lembaga lain dianggap tidak berfungsi. Padahal, menurut dia, mereka sudah melaksanakanya dengan maksimal dan profesional. "Saya kemudian berfikir jika seperti itu, berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat tidak punya fungsi dan seperti tidak diakui. Padahal dua intitusi tersebut adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah," katanya. (r/arf)